

PRANGKO DI INDONESIA: KRONOLOGI DALAM TINJAUAN SEJARAH POS KOLONIAL

Marlon NR Ririmasse

Abstrak

Rentang panjang kekuasaan kolonial di Indonesia antara lain direfleksikan lewat berbagai hasil budaya materi dengan ciri kolonial. Arkeologi sebagai studi yang mengkaji aspek-aspek masa lalu melalui hasil budaya materi sudah melakukan berbagai kajian untuk merekonstruksi ragam aspek kehidupan masa kolonial di Indonesia. Kajian bangunan monumental seperti benteng maupun kajian keruangan seperti pola tata kota adalah aspek-aspek yang cukup mendapat perhatian selama ini. Tulisan ini mencoba untuk melihat konstruksi budaya kolonial dengan sudut pandang berbeda melalui prangko sebagai artefak dalam konstruksi sejarah pos di Indonesia.

Kata Kunci: Kolonial, Pos, Surat, Tanda Bayar, VOC, Daendels, Inggris, Hindia Belanda, Prangko

PENDAHULUAN

Kedatangan orang-orang Eropa pertama di Asia Tenggara pada awal abad XVI kadang dipandang sebagai salah satu titik penting dalam sejarah kawasan ini. Momen tersebut sering dianggap membawa berbagai perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan di Asia Tenggara. Menurut Ricklefs (1995:31), pandangan ini tidak dapat dipertahankan. Meskipun orang-orang Eropa – terutama orang-orang Belanda - memiliki dampak yang besar terhadap Indonesia, namun hal ini pada dasarnya merupakan suatu gejala dari masa-masa yang belakangan. Pengaruh orang-orang Eropa pada tahun-tahun pertama kedatangan mereka sangatlah terbatas daerah dan kedalamannya. Hal yang sama nampaknya berlaku bagi pengaruh yang dibawa bangsa Eropa terhadap perkembangan sistem surat-menyurat di Indonesia. Meskipun pengaruh itu membawa perubahan yang besar nilainya bagi kemajuan sistem pos yang dirasakan saat ini. Dari sumber-sumber sejarah pos yang terbaca, jelas sekali bahwa pada awalnya sistem pos yang dibangun oleh orang-orang Belanda lebih banyak ditujukan

untuk kepentingan Belanda sendiri. Hal ini tampak dari kebijakan VOC yang melakukan proteksi ketat untuk surat-surat mereka dan membuka jalur pos untuk menghubungkan kota-kota yang penting bagi Belanda. Jadi, jika pengaruhnya baru terasa pada masa yang lebih kemudian sebagaimana dikatakan Ricklefs, hal itu nampaknya tepat. Baru pada awal abad XX sistem pos mulai menyentuh masyarakat bumiputera secara luas. Hal yang nampaknya, muncul sebagai imbas meningkatnya pemahaman masyarakat tentang fungsi pos. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan prangko di masyarakat juga menunjukkan bahwa penerbitan prangko tidak hanya ditujukan untuk membantu kelancaran komunikasi dalam masyarakat, namun telah menjadi salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah kolonial.

Prangko dalam Sejarah Pos Masa VOC

Sejarah prangko di Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari awal kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Pada bulan Juni 1596 ekspedisi Belanda yang pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten (Ricklefs: 1995:31). Ekspedisi ini membawa surat dari Negeri Belanda untuk raja Banten. Hal ini tercatat sebagai aktivitas surat menyurat pertama antara Negeri Belanda dengan Indonesia (Parapak, 1982:43).

Setelah Belanda mendirikan VOC pada bulan Maret 1602, aktivitas surat menyurat antara Indonesia dan Negeri Belanda turut meningkat. Surat-surat ini lebih banyak ditujukan kepada petugas VOC dan berhubungan dengan kepentingan perdagangan mereka. Karena itu isi dan volume surat dikontrol dan dibatasi. Kontrol dan pembatasan ini dimaksudkan agar sumber-sumber perdagangan VOC tidak diketahui oleh pesaing mereka. Di samping melakukan pembatasan, VOC juga melakukan sensor dan pencatatan terhadap isi surat yang dikirimkan, sehingga surat yang diterima pada masa itu biasanya disertai duplikatnya.

Pelayanan pos pada masa itu sama sekali tidak dapat dikatakan teratur. Pelayanannya sangat tergantung pada pelayaran kapal-kapal VOC. Bila ada kapal yang berlayar maka surat-surat dapat dikirimkan.

Sebaliknya bila tidak ada kapal yang berlayar, maka surat-surat tidak dapat dikirimkan.

Pada tahun 1619 Batavia dipilih sebagai basis VOC dan berkembang menjadi pusat pemerintahan Belanda di Jawa. Pada tahun 1633 balai kota Batavia mulai digunakan sebagai pusat masuk keluarnya surat-surat ke Batavia (Parapak 1982:44). Masyarakat dapat melihat dan mengambil surat yang ditujukan kepada mereka, setelah melalui proses pencatatan oleh pihak yang berwenang (Masyarakat yang dimaksudkan dalam kalimat ini adalah komunitas Belanda di Batavia. Tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut tentang instansi apa yang dimaksud sebagai pihak berwenang pada pernyataan ini). Pada masa itu, surat yang dikirim dari Negeri Belanda ke Batavia memakan waktu sembilan bulan, sementara dari Batavia ke Ambon memakan waktu empat bulan.

Kantor pos (*postkantor*) pertama dibuka di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G. W Baron van Imhoff. Pendirian kantor pos ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan surat-surat masyarakat, khususnya untuk mereka yang terlibat dalam perdagangan. Staf kantor pos tersebut terdiri dari dua orang petugas utama (*postmaster*) dibantu dua orang juru tulis (*schrijver*) dan beberapa orang tukang pos (*postbode*). Pembukaan kantor pos di Batavia kemudian disusul pembukaan kantor pos berikutnya di Semarang. Tujuan pembukaan kantor pos ini adalah agar hubungan pos antara kedua kota lebih teratur dan meningkatkan efektivitas pelayanan pos. Rute posnya saat itu melewati Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Selanjutnya, jasa layanan pos yang teratur juga mulai diberlakukan dari Batavia ke Priangan, Yogyakarta, dan Surakarta.

Pada masa VOC ini biaya pengiriman surat dibebankan kepada penerima surat. Penerima surat harus membayar lima *kelip* sementara penerima paket harus membayar sepuluh *kelip* (Nilai satu *kelip* sama dengan satu *stuiver*, atau sama dengan lima sen). Sistem pembayaran ongkos pengiriman di muka belum dikenal pada masa itu. Pada masa akhir VOC (tahun 1789) *franking stamps* (cap pos) mulai digunakan

sebagai bukti bahwa biaya pengiriman surat sudah dilunasi di muka. Prangko cap ini berbentuk lingkaran dengan tulisan VOC di bagian tengah.

Tanggal 1 Januari 1800 VOC dinyatakan bangkrut oleh Pemerintah Belanda karena terus menerus merugi dan tak mampu menanggung hutang yang besar akibat korupsi dalam kongsi dagang ini. Sebagai tindak lanjutnya seluruh aset, hak dan kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sebelumnya, tanggal 12 Januari 1799, seluruh kantor pos dan propertinya sudah dinyatakan berada di bawah kendali pemerintah Belanda. Di bawah pemerintahan baru ini sistem pos tidak mengalami banyak perubahan. Sensor surat masih diberlakukan, namun telah dibentuk suatu komisi sensor yang melakukan tugas dengan dihadiri penerima surat.

Pos Pada Masa Daendels

Tonggak sistem pos yang baru diletakkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang menjabat dari tahun 1808-1811. Segera setelah menjabat, Daendels yang mewakili kekuasaan pemerintah Prancis di Negeri Belanda, memerintahkan pembangunan jalan raya pos (*grote postweg*) yang menghubungkan kota-kota di pantai utara Jawa, mulai dari Anyer hingga ke Panarukan. Pembangunan jalan raya pos ini kemungkinan terinspirasi oleh jalan raya pos yang terkenal pada zaman Romawi di Eropa, *Cursus Publicus* (Parapak, 1982:). Panjang jalan raya pos Daendels ini adalah 1000 km dengan lebar 7,5 m (Handinoto, 1996:99). Dengan selesainya pembangunan jalan raya tersebut, maka perhubungan melalui jalan darat yang menghubungkan antara Batavia dan Surabaya yang dulunya memakan waktu 30-40 hari, dapat ditempuh dalam waktu 9-10 hari (*ibid*).

Pada masa kekuasaan Daendels tanda bukti pelunasan biaya pengiriman surat masih berupa cap pos dengan bentuk lingkaran sebagaimana masa VOC, namun pada bagian tengah terdapat tulisan “LN” yang merupakan inisial Louis Napoleon, penguasa pemerintahan Prancis di Negeri Belanda. Kemajuan sistem pos semasa berkuasanya Daendels lebih banyak diukur dari pertambahan jumlah sarana fisiknya,

seperti jalan dan kantor pos. Perubahan penting lainnya dalam sistem pos yang dibuat Daendels adalah penghapusan sistem sensor surat. Pembukaan surat yang dibuka selain oleh yang dialamatkan adalah tindakan ilegal (Parapak, 1982:).

Pos pada Masa Pemerintahan Inggris

Tahun 1811 penguasa Prancis di Jawa menyerah kepada Inggris. Tahun yang sama Thomas Stanford Raffles ditugaskan menjadi letnan gubernur jenderal di Jawa. Semasa pemerintahannya, Raffles mengeluarkan beberapa kebijakan baru tentang sistem pos. Satu di antaranya adalah tentang penggunaan jalan raya pos. Dalam peraturan ini pengguna jalan raya pos harus menggunakan kendaraan sendiri dan diharuskan membayar karcis yang akan digunakan sebagai biaya perawatan jalan. Bagi mereka yang menggunakan jasa kereta pos, pembayarannya harus dilakukan di muka. Jika pembayaran di muka tidak dilakukan maka pada amplop surat akan diberi cap *bearing postage* atau *unpaid* dan saat surat diterima, penerima harus melunasinya. Jika pembayaran dilakukan di muka maka pada amplop suratnya akan dibubuhi cap pos bertuliskan *postpaid*.

Pos pada Masa Hindia Belanda

Pada Tahun 1816 kekuasaan Belanda di Indonesia dikembalikan oleh Inggris sebagai kelanjutan Traktat London tanggal 13 Agustus 1814. Pemerintah baru yang disebut pemerintah Hindia Belanda, mengeluarkan beberapa peraturan baru menyangkut sistem pos. Tahun 1822 pemerintah Belanda memberikan kekuasaan kepada Hindia Belanda untuk mengatur sendiri masalah pos (*Gouvernementsbesluit* No. 7, 18 January 1822, *Staatsblad* No.1). Keputusan ini dikenal sebagai *Reglement op den brieven-en wagen op het eiland Java* atau Peraturan tentang pos di Jawa dan dimuat dalam *Staatsblad* 1823 No. 3. Seiring dengan meningkatnya volume surat menyurat, maka pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memonopoli segala hal yang menyangkut pelayanan pos. Keputusan ini diatur dalam *Staatsblaad* 1862 No. 103a. Sebelumnya tidak dikenal monopoli dan

masyarakat bebas untuk mengirimkan surat mereka melalui sarana yang dipandang baik. Pemerintah memang menyediakan pelayanan pos, tetapi terbatas untuk rute Anyer-Panarukan. Tahun 1876 manajemen pelayanan pos dialihkan dari *Direkteur de Produkten en der Civiele Magazijn* (Direktorat Agrikultur dan Biro Logistik) ke bawah kendali *Departement van Binnenlandsch Bestuur* (Departemen Dalam Negeri). Pada masa itu biaya pengiriman surat biasanya dilunasi pada saat pengiriman, dan pada amplopnya dibubuhi cap *franco* sebagai tanda bukti (Suatu hal yang tidak mengejutkan jika kemudian kata untuk *postage stamp* dalam bahasa Indonesia adalah 'prangko', yang berarti pihak tujuan surat bebas dari biaya pengiriman surat. Tidak ditemukan informasi dalam sumber-sumber sejarah pos tentang alasan dan makna kata *franco* yang digunakan sebagai tanda pelunasan surat pada masa Hindia Belanda).

Jika biaya pengiriman dibebankan kepada penerima maka amplopnya akan diberi cap "*ongefrankeerd*". Tanggal prangko diterima dibubuhkan pada bagian belakang amplop. Bentuk prangko cap sendiri sangat beragam antara lain lingkaran, semi lingkaran, oval, segi empat, dan segi delapan, namun bentuk yang dominan digunakan adalah lingkaran dan segi empat. Pada bagian tengah cap terdapat gambar lambang postal. Lambang Kerajaan Belanda juga sering dimunculkan sebagai figur pada cap (Lihat gambar). Gambar-gambar ini biasanya juga disertai teks nama kantor pos asal. Khusus untuk surat-surat pemerintah dibebaskan dari tarif pos. Untuk jenis surat-surat resmi ini akan diberi cap *dientstzaken* (Istilah untuk urusan resmi pemerintah). Hal ini tetap dengan persyaratan bahwa kepala kantor pos dan *supervisor* tetap harus mengadakan pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan. Sejak tahun 1907 pelayanan pos dan telegram menjadi salah satu divisi dari *Departement van Gouvernemenentsbedrijven* (Departemen Badan Usaha Milik Negara). Selanjutnya layanan pos, telegram, dan telepon dikepalai oleh *chef van de P.T.T dienst*. Antara tahun 1922-1923 kantor pusat P.T.T (PTT adalah singkatan dari *Post, Telegraph en Telephone dienst* atau layanan pos, telegram, dan telepon pada masa Hindia Belanda) yang sebelumnya berlokasi di *Weltevreden* (Daerah sekitar

Lapangan Banteng dan Medan Merdeka di Jakarta) dipindahkan ke gedung *Burgerlijke Openbare Werken* (Dinas Pekerjaan Umum) di Bandung.

PENERBITAN PRANGKO PERTAMA DI HINDIA BELANDA

Tahun 1862 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan keputusan tentang perlunya penggunaan prangko dalam pengiriman surat. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam *staatsblad* 1862 No. 103-a tanggal 22 Juni. Prangko pertama Hindia Belanda kemudian diterbitkan pada tanggal 1 April 1864. Prangko pertama ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Berwarna dasar merah anggur.
- Bernilai nominal (*Nominale Waarde*) 10 sen dan tertera pada sisi atas prangko.
- Memuat gambar raja Willem III dengan posisi menghadap ke depan.
- Memuat teks *post zegel* yang tertulis di atas gulungan kertas pada sisi bawah prangko dan teks *Nederl Indie*, yang tercetak vertikal pada sisi kiri dan kanan prangko.
- Tidak memiliki perforasi.
- Beroplak (jumlah cetakan) dua juta prangko.

PERKEMBANGAN TEMA DALAM DESAIN PRANGKO HINDIA BELANDA

Setelah penerbitan prangko pertama, pemerintah Hindia Belanda mulai menerbitkan prangko secara teratur. Prangko berperforasi pertama diterbitkan tahun 1868 menggunakan desain prangko Willem III tahun 1864 (Tim APPI, 2000:301). Pada tahun 1870 diterbitkan prangko seri untuk pertama kali, dengan tema Willem III dalam beragam warna dan nilai nominal. Pada tahun 1883 diterbitkan prangko seri dengan desain yang menampilkan tema angka dalam beragam warna dan nilai nominal. Prangko cetak tindih untuk pertama kalinya mulai digunakan pada tahun 1900, dengan menampilkan tema Ratu Wilhelmina. Prangko cetak tindih ini menggunakan prangko Belanda

yang lama, dan diberi cetakan nilai baru di atasnya. Hingga tahun 1923 prangko-prangko yang diterbitkan di Hindia Belanda semuanya menampilkan tema raja dan ratu atau angka, baik untuk prangko baru maupun cetak tindih.

Variasi dalam tema mulai diperkenalkan pada tahun 1930, melalui penerbitan seri prangko *Jeugd zorg* atau edisi “untuk remaja”. Desain prangko ini menggunakan tema lokal dengan desain yang menampilkan gambar antara lain Pura Besakih dan Candi Borobudur. Tema lokal kembali digunakan dalam seri prangko “palang putih” yang diterbitkan tahun 1931 dengan desain yang menampilkan gambar petani dan kerbau, nelayan dan perahu, tarian tradisional Jawa, dan musik tradisional. Setelah penerbitan prangko kedua seri prangko di atas, tema lokal mulai digunakan secara teratur dalam desain prangko Hindia Belanda, sehingga tidak lagi didominasi oleh prangko dengan tema raja dan ratu atau angka.

Desain prangko Hindia Belanda juga mulai menampilkan tema-tema baru, seperti nampak dalam penerbitan prangko seri militer tahun 1935 dan seri Bala Keselamatan tahun 1932 dan 1936. Beberapa edisi prangko yang diterbitkan juga menggambarkan kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah kolonial pada masa itu. Hal ini nampak dalam seri prangko *crisis werk A.M.V.J.* tahun 1933, prangko misi (*Centraal Missie Bureau*) tahun 1938, dan seri prangko biro sosial (*Sociaal Bureau voor Ned.Indie*) tahun 1939.

Prangko peringatan dalam rangka peristiwa tertentu diterbitkan pertama kali tahun 1923 melalui penerbitan seri prangko 25 tahun bertahtanya Ratu Wilhelmina. Prangko peringatan juga diterbitkan tahun 1937 dalam rangka *Wereld Jamboree* dengan desain yang menampilkan figur *Padvinder*. Tahun 1938 diterbitkan prangko seri dengan tema peringatan 10 tahun angkutan udara (*Tien Jaar Luchvaart*) yang menampilkan desain bergambar pesawat.

Selain tema dengan beragam desain di atas, beberapa edisi prangko Hindia Belanda juga menampilkan tema-tema khusus. Hal ini nampak dalam edisi prangko ‘dana *spitfire*’ tahun 1941, dengan tujuan penggalangan dana untuk pembelian pesawat tempur *spitfire*.

Tema khusus lainnya nampak dalam penerbitan seri prangko “Muhammadiyah” dengan desain yang menggambarkan bentuk-bentuk kegiatan organisasi ini. Satu tema khusus lain dalam prangko Hindia Belanda adalah seri pariwisata tahun 1945, dengan desain yang menampilkan gambar berbagai objek wisata di Hindia Belanda, salah satunya gambar Gunung Bromo.

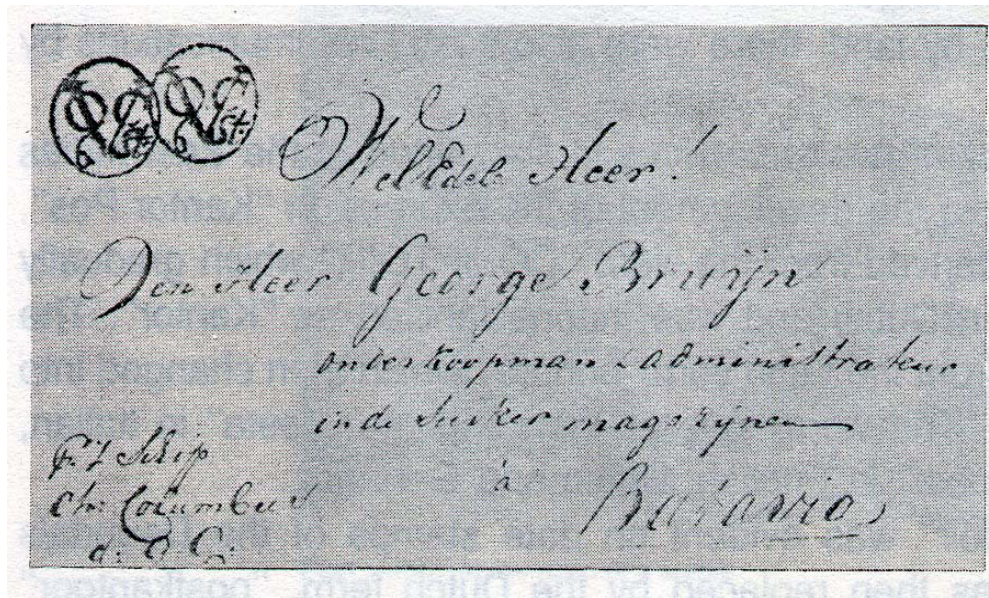
PENUTUP

Prangko adalah tanda bukti bahwa biaya pengiriman pos sudah dilunasi di muka. Pada masa VOC prangko masih berbentuk cap bertinta berbentuk lingkaran. Cap pos seperti ini juga digunakan pada masa Daendels dengan inisial LN atau Louis Napoleon. Pada masa Daendels ini juga pos memasuki babak baru dengan dibukanya jalur pos yang menghubungkan Anyer dan Panarukan. Memasuki masa Hindia Belanda sistem pos sudah lebih maju, antara lain ditandai dengan jumlah kantor pos yang meningkat pesat dan variasi media transportasi pos. Perkembangan kantor pos ini antara lain dapat dilacak dari cap pos dengan nama berbagai wilayah kerja kantor pos di Hindia Belanda. Tahun 1864 Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan prangko pertama dengan desain bergambar Raja Willem III sekaligus menandai era baru dalam sejarah pos kolonial yang lebih modern dan terbuka. Prangko-prangko pada masa selanjutnya yang diterbitkan pemerintah Hindia Belanda lebih bervariasi dalam desain dan tema. Perkembangan ragam desain ini pula yang pada akhirnya secara arkeologis bisa menunjukkan bagaimana konstruksi perkembangan prangko di Indonesia pasca kedatangan Bangsa Eropa

DAFTAR PUSTAKA

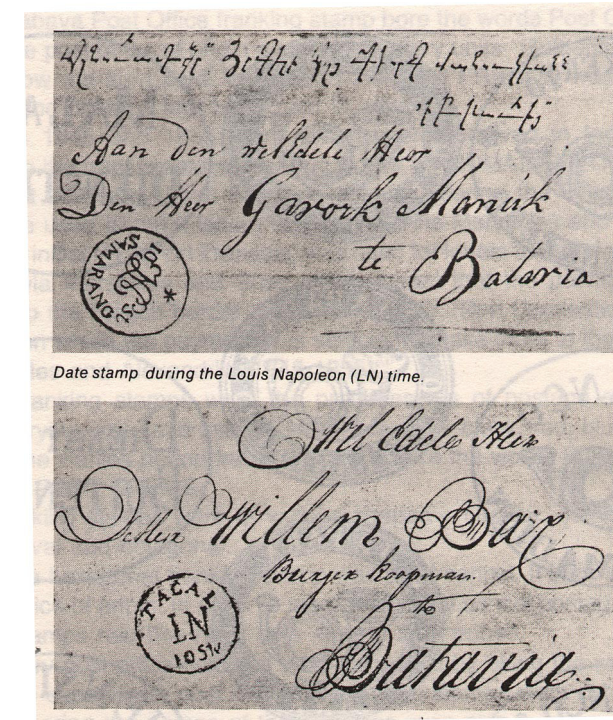
- Soerjono, 1995,
Mari Mengenal Filateli, Jakarta: Perusahaan Umum Pos dan Giro, 1995
David Scott, *European Stamp Design: A Semiotic Approach to Designing Messages*, London, Academy Editions.
- M.C Ricklefs, 1995,
Sejarah Indonesia Modern, (Terj. Dharmono Hardjowidjono) Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anne Parapak, 1982,
History of Posts & Telecommunications in Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.
- Datje Rahajoekoesoemah, 1991,
Kamus Belanda-Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Handinoto, 1996,
Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial di Surabaya 1870 1940, Surabaya: LPPKM Universitas Kristen Petra.
- Adolf Heuken, 2000,
Historical Sites of Jakarta, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Tim Asosiasi Pedagang Prangko Indonesia (Ed.), 2000,
Katalog Prangko Indonesia 2000, Jakarta: Buana Printing.

Prangko cap pada masa VOC



Sumber: Anne Parapak *History of Posts & Telecommunications in Indonesia*, Jakarta Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi, , 1982), hal. 45.

Prangko Cap pada Masa Daendels dengan Inisial 'LN' (Louis Napoleon)



Date stamp during the Louis Napoleon (LN) time.

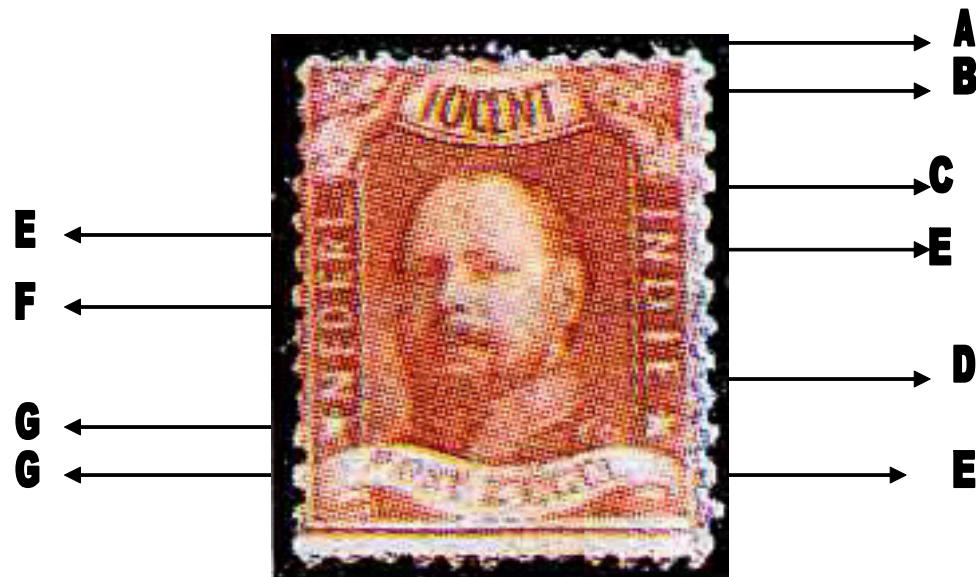
Sumber: Ana Parapak, *History of Posts and Telecommunications in Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi, 1982).

Ragam prangko cap pada masa sebelum digunakannya prangko di Hindia Belanda



Sumber: Ana Parapak, *History of Posts and Telecommunications in Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi, 1982).

Prangko Willem III 1868



Sumber: Tim Asosiasi Pedagang Prangko Indonesia (Ed.), *Katalog Prangko Indonesia 2000*, (Jakarta: Buana Printing, 2000)

Keterangan:

- A. Perforasi
- B. Nilai nominal
- C. Bingkai
- D. Figur ratu/raja
- E. Teks keterangan nama koloni
- F. Warna
- G. Ragam Hias pola geomteris bintang dan gulungan kertas

Ragam tema lokal dalam desain prangko Hindia Belanda



Sumber: Koleksi Penulis